



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL UMUM
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang, maka perlu menetapkan Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Fungsional Umum pada Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang;
- b. bahwa Uraian Tugas Jabatan dimaksud ditetapkan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pada Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang agar tercipta Organisasi Perangkat Daerah yang berhasil guna dan berdaya guna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Kupang, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46B Tahun 2000 tentang Evaluasi Jabatan;
 11. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah

Kota Kupang Nomor 200) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2015 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 259);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DAN URAIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
3. Walikota adalah Walikota Kupang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kupang.
5. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Kupang.
6. Bagian-bagian adalah Bagian-bagian pada Sekretariat Daerah Kota Kupang dan Sekretariat DPRD Kota Kupang.
7. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Kupang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.
8. Jabatan fungsional umum adalah sebutan untuk memberikan ciri dan gambaran atas isi jabatan dalam pemberian identitas terhadap pegawai negeri sipil di luar jabatan struktural dan Jabatan fungsional khusus.
9. Uraian Tugas jabatan adalah Uraian Tugas jabatan para pejabat struktural dan pejabat fungsional umum pada Sekretariat Daerah Kota Kupang, Staf Ahli Walikota Kupang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Kedudukan pemangku Jabatan Struktural, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan

sh

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.

- (2) Kedudukan pemangku Jabatan Fungsional Umum, sebagaimana diatur Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 05 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkan Uraian Tugas Jabatan ini adalah agar setiap pejabat dapat mengetahui secara jelas tugas dan tanggung jawab serta tujuan atau hasil akhir yang ingin dicapai dari setiap tugasnya.
- (2) Tujuan ditetapkan Uraian Tugas Jabatan ini adalah dalam rangka efisiensi, efektifitas dan peningkatan pelayanan administrasi dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungan Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.

BAB IV
URAIAN TUGAS
Pasal 4

- (1) Uraian Tugas Jabatan struktural dan jabatan fungsional umum di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Kupang adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Uraian Tugas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi pejabat struktural dan pejabat fungsional umum di lingkungan Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.
- (3) Rincian kegiatan dari masing-masing jabatan ditetapkan oleh Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Walikota ini maka :

sh

Peraturan Walikota Kupang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural dan Fungsional Umum Dilingkungan Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat DPRD Kota Kupang dan Peraturan Walikota Kupang Nomor 12A Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Walikota Kupang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural dan Fungsional Umum di Lingkungan Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Kupang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

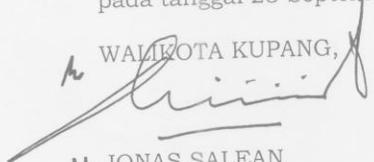
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

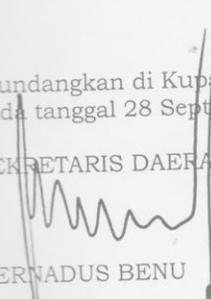
Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 September 2015

WALIKOTA KUPANG,


u JONAS SALEAN

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 28 September 2015

u SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG u


BERNADUS BENU

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2015 NOMOR 188